

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat menempati posisi sentral dalam arsitektur keuangan global. Dominasi ini tidak semata berpijak pada kekuatan militer, melainkan juga pada kemampuan Washington untuk membentuk dan mengendalikan struktur keuangan internasional melalui Dolar AS beserta institusi penentu standar keuangan dunia (Helleiner, 2014). Namun, kemunculan teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* dalam dua dekade terakhir menghadirkan tantangan serius terhadap tatanan ini. Bitcoin, yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, merepresentasikan upaya membangun sistem keuangan yang beroperasi tanpa kendali entitas tunggal dan meminimalkan intervensi pemerintah (Nakamoto, 2008). Peralihan menuju pasar berbasis teknologi baru ini berpotensi menggerus kemampuan negara hegemon dalam mengatur aliran modal internasional.

Cryptocurrency beroperasi di atas infrastruktur teknologi yang disebut *blockchain* yaitu sebuah buku besar digital terdistribusi yang mencatat dan memvalidasi transaksi aset digital secara terdesentralisasi. Berbeda dari sistem perbankan konvensional yang memerlukan perantara pihak ketiga, *blockchain* memungkinkan setiap transaksi diverifikasi secara kolektif oleh jaringan penggunanya berdasarkan prinsip *peer-to-peer*. Secara teknis, *blockchain* terdiri dari rangkaian blok yang masing-masing memuat data transaksi, hash (identitas

digital unik), dan *hash* dari blok sebelumnya guna menjamin integritas urutan data (Noorsanti, 2018).

Meskipun Amerika Serikat tidak mampu menutup teknologi *blockchain* secara keseluruhan, Washington tetap menguasai sejumlah simpul strategis yang menjembatani pasar modern dengan pasar tradisional. Perpindahan ke sistem baru tidak serta-merta menghapus pengaruh hegemonik. Salah satu instrumen utama yang memainkan peran ini adalah *Securities and Exchange Commission* (SEC). Meskipun SEC merupakan lembaga nasional, regulasi yang dikeluarkannya membimbing pasar kripto internasional melalui otoritas penegakan hukum yang dimilikinya. Ketika SEC mengambil tindakan hukum terhadap bursa global seperti Binance atau Coinbase, dampaknya terasa langsung pada pergerakan harga Bitcoin yang pada gilirannya mempengaruhi nilai cadangan aset digital El Salvador. Fenomena ini mencerminkan apa yang Susan Strange identifikasi sebagai kekuasaan struktural: kemampuan suatu negara untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan ekonomi negara lain tanpa perlu melakukan intervensi fisik secara langsung (Strange, 1988).

Benturan antara tatanan lama dan dinamika baru ini mencapai puncaknya pada tahun 2021, ketika El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah melalui *Bitcoin Law* (Alvarez et al., 2022). Motivasi utamanya bersifat ekonomis, remitansi dari diaspora Salvadoran di luar negeri menyumbang sekitar seperempat dari Produk Domestik Bruto negara tersebut (Sharma, 2021). Bagi El Salvador, Bitcoin merepresentasikan jalur alternatif menuju kemandirian ekonomi di tengah kerapuhan ekonomi global (Boos & Grigera, 2025). Keputusan Presiden Nayib

Bukele ini merupakan langkah berani untuk mengurangi ketergantungan pada kebijakan moneter *Federal Reserve* Amerika Serikat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan (Sharma, 2021). Dari perspektif geopolitik dan moneter, Bitcoin juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, cara melindungi diri dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Amerika Serikat (Sharma, 2021). Karena ketergantungannya yang besar pada USD, El Salvador sangat bergantung pada inflasi dan dengan demikian sangat rentan terhadap inflasi Amerika Serikat yang timbul dari kebijakan pencetakan uang besar-besaran yang diperkenalkan di sekitar tolok ukur nilai baru yang tidak dapat diubah oleh kebijakan domestik negara-negara yang lebih kuat (Sharma, 2021). Ini adalah langkah untuk memposisikan kembali negara tersebut untuk mencari investasi asing di sektor teknologi dan mengidentifikasi jalur pendanaan alternatif di luar ketergantungan pada pinjaman yang didukung *International Monetary Fund* (IMF) (Renteria et al., 2021). Transisi ini adalah upaya oleh El Salvador untuk merebut kembali sebagian dari kedaulatan keuangannya dan menjauhkan diri dari orbit kekuatan struktural keuangan tradisional yang telah mencirikan dan menjajah ruang ekonominya (Boos & Grigera, 2025).

Dalam pelaksanaannya, legalisasi Bitcoin menghadapi tantangan teknis yang cukup berat. Infrastruktur digital El Salvador belum sepenuhnya siap, sebagaimana terlihat dari berbagai gangguan pada aplikasi dompet digital pemerintah, *Chivo Wallet*, yang mengalami *error* transaksi dan bahkan kasus pencurian identitas (Reuters, 2021). Persoalan ini mengikis kepercayaan publik terhadap Bitcoin sebagai sistem pembayaran yang andal (Alvarez et al., 2022). Di tingkat internasional, El Salvador menghadapi tekanan signifikan dari IMF yang

berulang kali mengeluarkan peringatan dan menunda pencairan pinjaman senilai 1,3 miliar Dolar AS (Tasca, 2024). Dampaknya terasa langsung: lembaga pemeringkat kredit Fitch dan Moody's menurunkan peringkat El Salvador ke *junk status*, sehingga biaya pinjaman luar negeri meningkat secara signifikan (Basel Institute on Governance, 2022). Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada USD justru menimbulkan kerentanan baru, di mana mekanisme pasar keuangan global mampu membatasi akses suatu negara terhadap sistem keuangan internasional (Strange, 1988).

El Salvador menunjukkan ketahanan fiskal yang substansial di tengah prediksi kebangkrutan dari sejumlah ekonom internasional untuk periode 2022-2023 (Alvarez et al., 2022). Pemerintah di El Salvador mengatasi masalah keuangan melalui kebijakan pembelian kembali obligasi dan meningkatkan efektivitas fiskal domestik. Akibatnya, pemerintah El Salvador mampu memenuhi pembayaran utang obligasinya pada tahun 2023 dan 2025 tepat waktu (International Monetary Fund, 2025). Keberhasilan ini pada gilirannya secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan investor dan membantu dalam mengembangkan stabilitas ekonominya. Penulis juga berargumen bahwa El Salvador dapat mengelola keuangannya secara efisien, dan tidak berisiko gagal memenuhi komitmen keuangannya sebagai bagian dari hal yang sama, dan akan memperkuat El Salvador dalam negosiasi, seperti yang dicontohkan oleh reorientasi IMF dalam laporan 2024 dan 2025 tentang El Salvador. Sekarang seluruh diskusi telah beralih dari "hanya memerlukan penghapusan Bitcoin" ke mentalitas "manajemen risiko" yang lebih pragmatis (International Monetary Fund, 2024). Pada tahap negosiasi teknis yang sedang berlangsung ini, IMF

menekankan aspek transparansi dalam tata kelola pembelian Bitcoin negara tersebut dan meningkatkan pengawasan terhadap ekosistem *Chivo Wallet* untuk meminimalkan risiko terhadap integritas keuangan (Zetzsche et al., 2023).

Perubahan institusional semacam itu hanya diperlukan sebagai respons terhadap gejolak yang terjadi dalam sistem moneter digital, dan perubahan dalam kebijakan teknis domestik dari lembaga pengatur seperti SEC sangatlah penting (Saggu et al., 2025). Fenomena ini mengonfirmasi poin utama Susan Strange dalam "*States and Markets*", bahwa keputusan yang dibuat oleh pusat keuangan dunia cenderung memiliki pengaruh lebih besar terhadap pasar global dibandingkan percakapan diplomatik formal antar negara (Strange, 1988). Kasus El Salvador adalah contoh klasik bahwa kedaulatan masih terbatas dalam sistem kekuasaan yang diberlakukan oleh negara-negara hegemonik di zaman modern (Strange, 1988). Hal ini membuat penting, jika tidak bisa diperdebatkan, untuk mempelajari bagaimana sebuah negara kecil dapat menjadi mandiri dalam pasar modern yang masih secara struktural didominasi oleh kekuatan tradisional sebagai masalah kajian akademis (Katzenstein, 1985). Ini sesuai dengan kebutuhan Susan Strange untuk mempelajari tidak hanya hubungan antar negara tetapi juga bagaimana otoritas politik berkembang untuk menguasai struktur ekonomi global (Strange, 1988).

Amerika Serikat dan IMF sedang mengamankan kebijakan El Salvador. (Klein, 2025) Bitcoin dibangun sebagai ancaman terhadap stabilitas sistem moneter internasional dan integritas keuangan terkait pencucian uang (International Monetary Fund, 2022). Melalui "*speech act*" ini, Amerika Serikat

berhasil membenarkan tekanan ekonomi dan diplomatik yang membatasi manuver El Salvador di pasar modal internasional (Wæver, 1995). Pengamanan ini menciptakan tekanan moral dan stigma internasional terhadap El Salvador, yang kemudian mengakibatkan El Salvador menghadapi kesulitan dalam mengakses pinjaman internasional dan sering menerima peringatan keras dari lembaga pemeringkat kredit yang standarnya berakar pada kepentingan hegemonik Amerika Serikat (Boos & Grigera, 2025). Ini menunjukkan bahwa di era modern, kekuatan negara-negara besar belum hilang tetapi telah bermutasi menjadi kontrol atas standar keamanan global, aturan, dan narasi yang membatasi kedaulatan negara-negara kecil dan akses ke pasar ekonomi internasional (Strange, 1988).

Perubahan sikap dari regulator terhadap persetujuan dalam *Exchange-Traded Funds* (ETFs) Bitcoin spot akan menandai tahap baru dalam legitimasi aset digital di pasar institusi global yang dimulai pada awal 2024 (U.S. Securities and Exchange Commission, 2024). Perubahan ini akan memungkinkan aliran modal dari *Wall Street* untuk masuk ke ekosistem Bitcoin (Nishant & Lang, 2024). Terutama, ini memperdalam hubungan antara pasar kripto dan sistem keuangan Amerika Serikat (Prasad, 2021). Dalam kasus El Salvador, dominasi regulasi SEC adalah inti dari konsep struktural sebagaimana yang dikemukakan oleh Susan Strange, bahwa regulator Amerika Serikat mampu menegakkan standar keamanan investasi dan kepatuhan hukum yang kemudian dapat menjadi acuan bagi negara-negara global lainnya (Susan Strange, 1988). Dengan mengendalikan akses keuangan dan aturan kepatuhan yang berlaku untuk saluran likuiditas, kebijakan domestik SEC pada intinya adalah kontrol tidak langsung

atas posisi kedaulatan moneter digital negara-negara kecil di pinggiran keuangan internasional (Farrell & Newman, 2019).

Di tengah era digital modern, pemahaman tentang di mana kontrol atas tatanan global tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan militer tetapi lebih pada penguasaan kerangka keuangan dan aturan internasional sangat penting (Strange, 1988). Menggunakan contoh El Salvador, kita dapat memeriksa bagaimana langkah-langkah domestik dan regulasi entitas pengatur memberikan pengaruh ekstrateritorial pada kedaulatan moneter negara-negara kecil dan bagaimana wacana keamanan dieksploitasi oleh lembaga multilateral seperti IMF untuk mempertahankan status quo pasar konvensional dalam menghadapi bahaya desentralisasi. Perspektif ini penting untuk gambaran lengkap tentang masalah saling ketergantungan yang kita hadapi dan keuangan abad ke-21, di mana kemajuan teknologi (seperti yang terlihat pada Bitcoin) harus berjuang dalam struktur kekuasaan yang terus sangat terpusat (Prasad, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan *Securities and Exchange Commission* Amerika Serikat menjadi alat penggerak kekuasaan struktural dalam sistem *cryptocurrency* internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran SEC Amerika Serikat dalam memanifestasikan kekuasaan struktural pada pasar *cryptocurrency* internasional guna mempertahankan hegemoni finansial Amerika Serikat, dengan berfokus pada dampak kebijakannya terhadap stabilitas ekonomi El Salvador.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis mekanisme kerja kebijakan SEC sebagai instrumen *structural power* yang mampu menentukan parameter legalitas dan standar keamanan dalam ekosistem aset digital global.
2. Menganalisis mekanisme *Weaponized Interdependence* melalui tindakan penegakan hukum SEC, guna memahami bagaimana instrumen tersebut digunakan untuk menekan stabilitas moneter dan menghambat upaya kemandirian ekonomi negara di luar sistem keuangan tradisional Amerika Serikat.
3. Menjelaskan keterkaitan antara regulasi SEC dengan tekanan institusional IMF dalam upaya menciptakan isolasi finansial terhadap negara yang mengadopsi mata uang kripto sebagai *legal tender*.
4. Mengevaluasi efektivitas penggunaan instrumen regulasi pasar modal oleh Amerika Serikat dalam membendung upaya de-dolarisasi dan tantangan terhadap dominasi sistem keuangan tradisional yang berbasis USD.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, secara umum penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini membantu berkontribusi dalam studi Hubungan Internasional, terutama bidang Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang terkait dengan kekuasaan struktural di era digital. Penelitian menggunakan gagasan Susan Strange tentang kekuasaan struktural dan diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik tentang bagaimana badan regulasi domestik seperti SEC dapat berubah menjadi alat kontrol keuangan global yang mempengaruhi kebijakan moneter negara-negara berdaulat. Selain itu, penelitian ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana sekuritas ekonomi beradaptasi dengan tantangan teknologi desentralisasi seperti Bitcoin di negara-negara pinggiran. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada isu kedaulatan digital, hegemoni finansial Amerika Serikat, serta mekanisme kekuasaan dalam pasar mata uang kripto internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kekuasaan struktural bekerja melalui regulasi keuangan di Amerika Serikat. Ini berguna bagi pembuat kebijakan di negara berkembang, organisasi internasional, dan otoritas moneter untuk memahami risiko dan peluang dalam mengadopsi teknologi keuangan terdesentralisasi. Dengan hasil penelitian

ini, diharapkan pemerintah dan lembaga keuangan menjadi lebih sadar tentang dampak kebijakan SEC yang melampaui batas negara, serta bagaimana tekanan dari institusi multilateral seperti IMF dapat membatasi ruang gerak kebijakan ekonomi domestik suatu negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi negara-negara yang berencana melakukan diversifikasi aset digital mengenai pentingnya membangun ketahanan fiskal dan infrastruktur regulasi yang mandiri guna menghadapi dominasi serta isolasi finansial dalam struktur keuangan global yang berbasis USD.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Literature Review

Penelitian yang dilakukan oleh Alvarez, Argente, dan Van Patten (2022) berjudul “*Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador*” yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah menyediakan landasan empiris yang kuat mengenai praktik penerapan Bitcoin di tingkat masyarakat (Alvarez et al., 2022). Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah El Salvador telah melakukan intervensi besar melalui pemberian insentif penggunaan *Chivo Wallet*, tingkat pemanfaatan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari tetap relatif rendah (Alvarez et al., 2022). Penelitian tersebut menegaskan bahwa legitimasi hukum semata tidak cukup untuk mendorong adopsi teknologi finansial, karena masih terdapat hambatan struktural berupa rendahnya kepercayaan publik terhadap volatilitas Bitcoin serta preferensi masyarakat yang tetap condong pada USD sebagai instrumen penyimpanan nilai yang dianggap lebih stabil (Alvarez et al., 2022).

Kajian menarik yang ditulis oleh Zetzsche, Anker-Sørensen, Arner, dan Buckley pada tahun 2023 berjudul “*The Crypto-Asset Ecosystem: Hungry for Regulation or Can It Be Tamed?*” (Zetzsche et al., 2023). Mereka membahas tentang bagaimana regulasi dalam ekosistem aset kripto di seluruh dunia bekerja (Zetzsche et al., 2023). Menurut literatur ini, pasar kripto semakin kompleks dan hal ini membawa potensi risiko besar bagi sistem keuangan internasional (Zetzsche et al., 2023). Mereka melakukan analisis dan menemukan bahwa tanpa aturan yang jelas dan sama dari negara-negara dengan pasar keuangan yang kuat, harga aset kripto bisa berubah-ubah dan mengganggu kestabilan sistem uang yang sudah ada (Zetzsche et al., 2023). Dalam hal ini, otoritas pengawas pasar keuangan memiliki peran penting untuk membuat batasan yang jelas agar inovasi keuangan tetap sesuai dengan prinsip kestabilan global (Zetzsche et al., 2023).

Penelitian Eswar S. Prasad pada tahun 2021 dalam bukunya yang berjudul “*The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance*” membahas tentang persaingan antara mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral dan mata uang kripto yang tidak terkendali (Prasad, 2021). Menurut Prasad, perkembangan teknologi *blockchain* tidak langsung melemahkan kekuasaan mata uang utama di dunia. Sebaliknya, proses digitalisasi keuangan seringkali menciptakan sistem pengawasan baru yang memungkinkan negara yang menerbitkan mata uang utama untuk memperkuat posisinya dengan menggunakan teknologi mutakhir (Prasad, 2021). Ia menegaskan bahwa meskipun Bitcoin mengusung narasi tentang desentralisasi, operasionalnya tetap bergantung pada akses likuiditas dalam sistem keuangan internasional (Prasad, 2021). Sistem keuangan internasional ini masih berpusat

pada USD (Prasad, 2021). Ini berarti bahwa Bitcoin tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh sistem keuangan yang ada (Prasad, 2021). Bitcoin tetap membutuhkan akses likuiditas dari sistem keuangan internasional yang berpusat pada USD untuk dapat beroperasi dengan efektif (Prasad, 2021).

Kajian yang dilakukan oleh Kalyanpur dan Newman (2019) berjudul *“Jurisdiction, Task Expansion, and the Limits of State Power”* memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana negara dengan pasar domestik yang besar menggunakan otoritas hukum mereka untuk mengatur aktivitas ekonomi di luar perbatasannya (Kalyanpur & Newman, 2019). Literatur ini menjelaskan bahwa negara-negara hegemon seringkali melakukan ekspansi yurisdiksi melalui lembaga pengawas pasar modal untuk memastikan kepatuhan global terhadap standar domestik mereka (Kalyanpur & Newman, 2019). Mereka berpendapat bahwa kontrol atas "pintu gerbang" keuangan memungkinkan negara pusat untuk memaksa aktor internasional, termasuk negara-negara kecil, agar tetap berada dalam kerangka regulasi yang ditetapkan (Kalyanpur & Newman, 2019). Dalam konteks ini, otoritas regulasi bertindak sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjaga pasar domestik tetapi juga mengamankan kepentingan geopolitik melalui penguasaan struktur keuangan global (Kalyanpur & Newman, 2019). Hal ini relevan untuk memahami bagaimana tindakan regulatif SEC dapat menjangkau kebijakan kedaulatan moneter di negara-negara periferal (Kalyanpur & Newman, 2019).

Penelitian yang ditulis oleh Farrell dan Newman (2019) berjudul *“Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State*

Coercion” memperkenalkan konsep ketergantungan bersenjata dalam jaringan global yang terintegrasi (Farrell & Newman, 2019). Studi ini menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi global yang terlihat desentralistik sebenarnya memiliki titik-titik pusat (*hubs*) yang dikuasai oleh segelintir negara dominan (Farrell & Newman, 2019). Menurut literatur ini, negara yang menguasai titik pusat tersebut memiliki kemampuan untuk memutus atau membatasi akses aktor lain terhadap jaringan keuangan internasional sebagai bentuk sanksi atau tekanan politik (Farrell & Newman, 2019). Mereka menegaskan bahwa kekuatan suatu negara di era modern tidak lagi hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi dari kapasitasnya untuk memanfaatkan ketergantungan struktural aktor lain dalam jaringan komunikasi dan keuangan (Farrell & Newman, 2019).

Berdasarkan penelaahan kritis terhadap literatur-literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kekosongan analisis terkait bagaimana kebijakan regulasi yang bersifat spesifik dari institusi domestik negara hegemon (khususnya Amerika Serikat) digunakan sebagai instrumen strategis dalam menjalankan kekuasaan struktural di pasar *cryptocurrency* internasional. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada dampak ekonomi domestik atau urgensi regulasi secara umum, tanpa mengaitkannya dengan mekanisme kekuasaan politik internasional (Alvarez et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan konsep structural power Susan Strange guna menganalisis tindakan-tindakan regulatif spesifik sebagai bentuk kontrol tidak langsung terhadap negara-negara yang berupaya menantang hegemoni keuangan tradisional melalui pemanfaatan teknologi digital (Strange, 1988).

1.5.2 Kerangka Pemikiran

1.5.2.1 Teori Ekonomi Politik Internasional (Susan Strange)

Ekonomi Politik Internasional versi Susan Strange dipakai sebagai payung teoritis utama untuk menganalisis interaksi yang kompleks antara otoritas politik negara dan dinamika pasar (Strange, 1988). Menurut Susan Strange, analisis Hubungan Internasional yang biasa dilakukan sering mengabaikan kekuatan pasar sebagai alat politik. Dalam kasus El Salvador yang mengadopsi Bitcoin, Ekonomi Politik Internasional memberikan pandangan bahwa hal ini tidak hanya soal inovasi teknologi keuangan atau inklusi finansial, tapi lebih dari itu, yaitu sebuah tindakan politik yang menantang distribusi kekuasaan dalam sistem keuangan internasional. (Strange, 1988) Ekonomi Politik Internasional memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa setiap upaya de-dolarisasi dari negara periferi seperti El Salvador akan memicu reaksi defensif dari aktor hegemon (Amerika Serikat) (Prasad, 2021). Aktor hegemon tersebut akan menggunakan seluruh instrumen ekonomi yang dimilikinya (termasuk regulasi pasar modal) untuk menjaga stabilitas tatanan internasional yang selama ini memberikan keuntungan asimetris bagi posisi mereka (Strange, 1988).

1.5.2.2 Konsep Structural Power (Susan Strange)

Inti dari analisis penelitian ini terletak pada konsep *Structural Power*, yang didefinisikan oleh Strange sebagai kemampuan suatu aktor untuk menentukan "panggung" atau kerangka kerja di mana aktor lain harus beroperasi (Strange, 1988). Berbeda dengan kekuasaan relasional yang bersifat paksaan langsung, kekuasaan struktural SEC bekerja melalui pembentukan aturan main global

(Strange, 1988). Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua dimensi utama yang pertama Struktur Keuangan adalah cara suatu lembaga keuangan mengatur dan mengelola keuangannya. (Strange, 1988) Dalam konteks ini, SEC menggunakan otoritas penegakan hukum terhadap bursa kripto internasional untuk mengontrol aliran likuiditas (Kalyanpur & Newman, 2019). Dengan mengklasifikasikan aset digital sebagai sekuritas, SEC mampu memicu volatilitas harga Bitcoin secara global (Zetzsche et al., 2023). Hal ini secara otomatis menggerus nilai cadangan aset nasional El Salvador. (Prasad, 2021) Kedua, dalam konteks Struktur Pengetahuan (*Knowledge Structure*), SEC memegang otoritas epistemik dalam menentukan definisi legal dan standar kepatuhan (Strange, 1988). Melalui produksi informasi mengenai risiko dan keamanan investasi, SEC membentuk persepsi pasar global (Strange, 1988). Jika SEC melabeli sebuah praktik ekonomi sebagai "berisiko tinggi", maka secara struktural El Salvador akan kehilangan kepercayaan dari investor internasional, terlepas dari kondisi riil ekonomi domestiknya (International Monetary Fund, 2022).

1.5.2.3 Konsep Securitization (Copenhagen School)

Untuk memahami bagaimana kekuasaan struktural tersebut memperoleh legitimasi, penelitian ini meminjam konsep *securitization* yang dikembangkan oleh Copenhagen School, sebuah mazhab studi keamanan yang lahir dari *Copenhagen Peace Research Institute* (COPRI) pada dekade 1990-an. Tokoh utamanya adalah Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, yang karya seminalnya, *Security: A New Framework for Analysis* (1998), meletakkan dasar

teoretis bagi pemahaman keamanan sebagai konstruksi sosial, bukan realitas objektif yang berdiri sendiri (Buzan et al., 1998).

Inti dari teori sekuritisasi terletak pada gagasan bahwa keamanan bukanlah kondisi alamiah, melainkan sebuah *performative act* yang tercipta melalui bahasa. Wæver (1995) mengadaptasi teori *speech act* dari filsuf bahasa J.L. Austin untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut Austin (1962), terdapat jenis ujaran tertentu yang bukan sekadar mendeskripsikan kenyataan tetapi justru menciptakan kenyataan baru pada saat diucapkan; misalnya, ketika seorang hakim berkata “saya menyatakan terdakwa bersalah,” ujaran itu sendiri mengubah status hukum seseorang. Dalam logika yang serupa, Wæver berargumen bahwa ketika seorang aktor otoriter menyatakan suatu isu sebagai “ancaman eksistensial,” ujaran tersebut memindahkan isu itu dari ranah politik biasa ke ranah keamanan darurat, sehingga tindakan-tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) yang normalnya tidak dapat diterima menjadi sah secara politik (Wæver, 1995).

Proses sekuritisasi berlangsung melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, terdapat *securitizing actor*, yaitu aktor yang melakukan tindakan tutur keamanan. Buzan et al. (1998) menjelaskan bahwa aktor ini biasanya merupakan elit politik, badan pemerintah, birokrat, atau kelompok penekan yang memiliki posisi otoritatif dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan keamanan. Tidak sembarang orang bisa melakukan sekuritisasi; posisi sosial dan kapasitas kelembagaan menjadi modal penting bagi keberhasilan tindakan tutur tersebut (Buzan et al., 1998). Kedua, terdapat *referent object*, yaitu sesuatu yang dinyatakan terancam dan perlu dilindungi. Objek

rujukan ini bisa berupa negara, kedaulatan, stabilitas sistem keuangan, identitas kolektif, atau tatanan sosial tertentu. Dalam kerangka Copenhagen School, setiap sektor keamanan memiliki objek rujukannya masing-masing; misalnya, di sektor ekonomi, objek rujukannya adalah stabilitas sistem finansial global (Buzan et al., 1998). Ketiga, terdapat *audience*, yaitu khalayak yang harus menerima klaim ancaman tersebut agar proses sekuritisasi berhasil. Dimensi intersubjektif inilah yang membedakan sekuritisasi dari sekadar propaganda; tanpa persetujuan atau penerimaan dari audiens yang relevan, upaya sekuritisasi tetap hanya berupa *securitizing move* yang gagal (Buzan et al., 1998).

Selain ketiga komponen tersebut, Buzan et al. (1998) juga mengidentifikasi apa yang mereka sebut *facilitating conditions*, yaitu kondisi-kondisi yang memungkinkan sekuritisasi berhasil. Kondisi pertama bersifat internal, yakni tindakan tutur harus mengikuti tata bahasa keamanan: mengartikulasikan ancaman eksistensial, menunjukkan titik kritis yang tidak bisa ditunda penanganannya (*point of no return*), dan menawarkan jalan keluar melalui tindakan luar biasa. Kondisi kedua bersifat sosial, yakni posisi otoritatif aktor yang melakukan sekuritisasi serta karakteristik ancaman yang diangkat haruslah cukup meyakinkan bagi audiens target (Buzan et al., 1998). Dengan kata lain, keberhasilan sekuritisasi tidak semata bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada siapa yang menyampaikannya dan dalam konteks sosio-politik seperti apa pesan itu disampaikan.

Penting untuk dipahami bahwa Copenhagen School memandang sekuritisasi sebagai bagian dari sebuah spektrum. Suatu isu bisa berada pada

posisi *non-politicised* (ketika isu tersebut tidak menjadi urusan publik sama sekali), bergeser ke posisi *politicised* (ketika isu menjadi bagian dari perdebatan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintah), dan akhirnya memasuki posisi *securitised* (ketika isu diangkat melampaui batas politik normal sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons darurat). Wæver (1995) justru melihat sekuritisasi sebagai perkembangan yang semestinya dihindari, karena memindahkan isu dari ruang deliberasi demokratis ke ranah kedaruratan yang cenderung membungkam perdebatan. Oleh karena itu, ia mengadvokasi *desecuritization*, yakni proses mengembalikan isu dari ranah keamanan ke ranah politik biasa, sebagai kondisi yang lebih ideal.

Dalam konteks penelitian ini, konsep sekuritisasi digunakan untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat, melalui SEC dan dengan dukungan retorik dari IMF, melakukan tindakan tutur keamanan terhadap Bitcoin. SEC bertindak sebagai *securitizing actor* yang menyatakan bahwa Bitcoin merupakan ancaman terhadap stabilitas moneter global, keamanan sistem perbankan, dan integritas keuangan, khususnya terkait risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (International Monetary Fund, 2022). *Referent object* dalam hal ini adalah tatanan keuangan global berbasis Dolar AS beserta seluruh infrastruktur regulasi yang menopangnya. Sementara itu, *audience*-nya mencakup komunitas investor internasional, lembaga pemeringkat kredit, organisasi multilateral, dan negara-negara anggota IMF. Narasi sekuritisasi ini menjadi krusial karena berhasil membenarkan serangkaian tindakan luar biasa: mulai dari isolasi finansial, penangguhan pencairan pinjaman multilateral, hingga tekanan diplomatik yang

membatasi ruang gerak kebijakan El Salvador di pasar modal internasional (Buzan et al., 1998).

1.5.2.4 Konsep *Weaponized Interdependence* (Henry Farrel dan Abraham L. Newman)

Dalam hal ini, untuk menjelaskan bagaimana tekanan teknis diberikan pada El Salvador, penelitian ini menggunakan konsep yang disebut *Weaponized Interdependence* dari Henry Farrell dan Abraham L. Newman. Mereka berpendapat bahwa ketergantungan antarnegara dalam jaringan global yang tersentralisasi dapat digunakan sebagai senjata oleh negara yang menguasai titik pusat atau hub dari jaringan tersebut. Amerika Serikat memiliki posisi penting sebagai hub utama dalam infrastruktur keuangan dan sistem kliring USD di dunia (Farrell & Newman, 2019). Dalam kerangka ini, SEC menggunakan struktur jaringan keuangan untuk menciptakan efek *choke point* dan pengawasan terhadap ekosistem aset digital internasional (Farrell & Newman, 2019). Konsep *choke point* merujuk pada simpul kritis dalam jaringan keuangan global di mana Amerika Serikat dapat membatasi atau memutus akses aktor lain terhadap aliran modal dan layanan keuangan internasional. Dalam konteks ini, kedaulatan digital El Salvador menghadapi kerentanan asimetris: Amerika Serikat dapat mengancam atau memutus akses negara tersebut terhadap infrastruktur keuangan global apabila El Salvador tetap melanjutkan kebijakan Bitcoin yang dianggap menyimpang dari standar regulasi Washington (Farrell & Newman, 2019). Kondisi ini membuktikan bahwa teknologi desentralisasi tetap dapat dikontrol

melalui penguasaan atas simpul strategis jaringan keuangan yang bersifat sentralistik.

1.6 Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama untuk mengkaji peran SEC Amerika Serikat sebagai alat kekuasaan struktural dalam pasar *cryptocurrency* internasional dengan studi kasus El Salvador. Operasionalisasi konsep bertujuan untuk menjabarkan indikator-indikator empiris yang dapat diukur guna menjelaskan bagaimana regulasi domestik Amerika Serikat mampu mendikte kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi negara lain melalui mekanisme kekuasaan struktural, sekuritisasi, dan *weaponized interdependence*.

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan empat elemen kunci sebagai pisau analisis (Strange, 1988). Pertama, Kekuasaan Struktural dipahami sebagai kemampuan aktor untuk menentukan struktur ekonomi politik global di mana aktor lain harus beroperasi (Strange, 1988). Dalam konteks ini, SEC menggunakan penguasaan pada Struktur Keuangan (kontrol likuiditas) dan Struktur Pengetahuan (otoritas definisi risiko) untuk menekan El Salvador. (Strange, 1988) Kedua, *Securitization* dipahami sebagai tindakan tutur (*speech act*) yang memindahkan isu ekonomi normal ke ranah keamanan guna menjustifikasi langkah-langkah luar biasa (Buzan et al., 1998). Ketiga, *Weaponized Interdependence* sebagai strategi penggunaan kontrol atas titik-titik pusat (*hubs*) dalam jaringan infrastruktur keuangan dan komunikasi global oleh negara dominan untuk menekan aktor lain, maka konsep ini menjelaskan

bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan ketergantungan sistem keuangan dunia pada USD dan jaringan perbankan Amerika Serikat untuk menciptakan efek titik mati (*choke point*) yang menghambat gerak ekonomi El Salvador (Farrell & Newman, 2019).

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk mengukur seberapa besar pengaruh Amerika Serikat terhadap dunia melalui aturan keuangan yang berdampak global. Pertama, Kekuatan Struktural Amerika Serikat didefinisikan sebagai kemampuan Washington, melalui badan pengawas SEC, untuk menentukan bagaimana sistem keuangan global harus dijalankan, aturan main apa yang harus dipakai, dan norma apa yang harus diikuti dalam struktur keuangan global (Strange, 1988). Ini dioperasionalkan melalui penguasaan terhadap struktur keuangan dan struktur pengetahuan, seperti yang dikemukakan oleh Strange pada tahun 1988. Di dalamnya, SEC memiliki otoritas tunggal untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai aset keuangan legal, atau yang biasa disebut sekuritas, serta apa yang dianggap sebagai risiko sistemik. (U.S Securities and Exchange Commission, 2020) Indikator utamanya adalah penggunaan yurisdiksi domestik Amerika Serikat sebagai standar universal (Kalyanpur dan Newman, 2019). Ini memaksa aktor negara lain untuk patuh dan mengikuti standar tersebut, agar tidak terisolasi dari sirkulasi kapital global (Thompson, 2018).

Kedua, penyalahgunaan otoritas regulasi sebagai instrumen koersi terjadi ketika SEC melakukan tindakan yang melampaui batas fungsi administratifnya

(Kalyanpur dan Newman, 2019). SEC kemudian menjadi alat politik ekonomi untuk mengendalikan negara yang mencoba lepas dari pengaruh dolar (Helleiner, 2014). Hal ini dapat dilihat melalui cara SEC menggunakan posisi Amerika Serikat sebagai pusat keuangan dunia (Oatley, 2013). Mereka melakukan sekuritisasi terhadap inovasi moneter dari pihak lain (Buzan et al., 1998). Dalam konteks ini, tindakan SEC seperti mengajukan tuntutan hukum terhadap platform kripto atau mengeluarkan pernyataan tentang risiko kebijakan moneter negara lain, seperti El Salvador, merupakan bentuk intervensi yang membatasi pilihan kebijakan ekonomi negara tersebut (Thompson, 2018).

Terakhir, dinamika pasar tradisional dan pasar modern menjadi ajang pertarungan antara keadaan yang sudah ada dan inovasi baru (Strange, 1988). Pasar tradisional ini merujuk pada sistem keuangan yang menggunakan dolar sebagai patokan, dan sangat terpusat, di mana Amerika Serikat memiliki kontrol penuh atas aliran uang dan aturan yang berlaku (Helleiner, 2014). Sementara itu, pasar modern didefinisikan sebagai suatu lingkungan digital yang terdesentralisasi, seperti Bitcoin, yang berpotensi untuk mengurangi pengaruh kekuasaan struktural Amerika Serikat (Nakamoto, 2008). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Amerika Serikat menggunakan kekuatan regulatifnya untuk "menjinakkan" pasar modern tersebut agar tetap berada dalam kendali strukturalnya, sehingga kedaulatan moneter negara lain tetap berada dalam ruang lingkup pengaruh ekonomi politik Amerika Serikat (Farrell dan Newman, 2019).

1.7 Argumen Penelitian

Kebijakan regulasi SEC Amerika Serikat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif teknis tetapi juga sebagai kekuatan struktural, menggunakan cara pertahanan hegemonik untuk menjaga dominasi USD meskipun ada tantangan desentralisasi. Kemandirian moneter melalui teknologi desentralisasi sangat sulit dicapai karena tekanan struktural dan narasi sekuritisasi yang kuat. Selama infrastruktur keuangan dan komunikasi global masih berada di bawah kendali tunggal Amerika Serikat, setiap upaya negara lain untuk melakukan inovasi moneter di luar sistem tradisional akan tetap dapat dikontrol melalui penguasaan atas pintu gerbang jaringan keuangan yang bersifat sentralistik.

1.8 Metode Penelitian

Agar sebuah penulisan ilmiah dapat dianggap valid, penting untuk menerapkan metode penelitian selama proses pengerjaan. Metode penelitian berfungsi sebagai cara atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi baru serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk membedah bagaimana instrumen regulasi domestik Amerika Serikat dapat beroperasi sebagai kekuatan politik di tingkat global.

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam karya tulis ini, jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memang lebih fokus pada menganalisis data yang tidak berupa angka, seperti teks, video, atau audio. Data-data ini kemudian dikelola dengan tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang suatu konsep, isu, teori, atau masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan penelitian kualitatif, diharapkan dapat ditemukan gagasan-gagasan baru yang sebelumnya belum terungkap. Menurut Bhandari pada tahun 2020, penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dapat membantu memberikan wawasan yang lebih baik tentang suatu fenomena dan pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan dengan mengkontekstualisasikan hasil penelitian tersebut. Penulis memilih metode ini karena data yang dibutuhkan bersifat tekstual dan deskriptif, yang menggambarkan peran kebijakan SEC Amerika Serikat sebagai alat kekuasaan struktural terhadap kedaulatan moneter El Salvador.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs ini melakukan penelitian dengan cara non-lapangan, yang disebut desk study. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis dokumen, laporan, dan literatur ilmiah yang terkait dengan kebijakan SEC dan penggunaan Bitcoin di El Salvador. Sumber data utama berasal dari jurnal akademik, laporan dari organisasi internasional seperti IMF, informasi resmi dari situs penegakan hukum SEC, dan studi kasus tentang dinamika ekonomi politik internasional di pasar *cryptocurrency*. Penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan nasional El Salvador dan regulasi Amerika Serikat sebagai bahan analisis utama.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian tidak mengacu pada individu atau institusi yang diwawancarai secara langsung, melainkan pada representasi aktor-aktor kunci yang dianalisis melalui sumber-sumber data sekunder. Karena pendekatan yang digunakan adalah non-lapangan (*desk study*), maka seluruh kajian dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, laporan kebijakan, jurnal akademik, serta publikasi dari organisasi internasional dan lembaga pemerintah yang relevan dengan kebijakan SEC dan pengaruhnya terhadap pasar *cryptocurrency* internasional. Subjek-subjek ini terdiri atas aktor-aktor institusional yang perannya dapat dipahami melalui teks dan analisis literatur.

Beberapa aktor yang terlibat dalam pasar modal global antara lain institusi negara seperti pemerintah Amerika Serikat melalui SEC. SEC bertanggung jawab dalam membuat regulasi dan menegakkan hukum di pasar modal global. Kebijakan yang dibuat oleh SEC sangat penting karena lembaga ini memiliki kekuasaan struktural yang besar dan dapat menentukan standar keuangan di seluruh dunia. Selain itu, pemerintah El Salvador juga menjadi sorotan karena perannya sebagai negara yang berani mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah El Salvador ini menjadi contoh kasus yang menarik karena kebijakan domestiknya sangat dipengaruhi oleh tekanan regulasi dari luar negeri.

Penelitian ini juga mempelajari laporan dan penilaian dari lembaga internasional seperti IMF yang memiliki tugas mengawasi stabilitas keuangan global dan memberikan tekanan pada kebijakan moneter El Salvador. Perusahaan

teknologi finansial dan bursa *cryptocurrency* internasional juga sangat penting karena mereka memainkan peran sebagai infrastruktur yang harus patuh pada yurisdiksi Amerika Serikat. Selain itu, lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's dan Fitch juga menjadi bagian dari analisis karena mereka membantu menunjukkan dampak ekonomi politik dari kebijakan SEC terhadap kredibilitas fiskal El Salvador.

Dengan demikian, subjek penelitian dalam studi ini bersifat konseptual dan direpresentasikan melalui data sekunder yang menggambarkan posisi, kebijakan, serta dinamika interaksi para aktor tersebut dalam konteks kekuasaan struktural Amerika Serikat di pasar aset digital internasional. Seluruh analisis dilakukan dengan mengacu pada narasi dan temuan dalam literatur, tanpa keterlibatan langsung dari subjek sebagai partisipan aktif dalam proses penelitian.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut terdiri dari berbagai sumber sekunder yang relevan dengan fokus studi, antara lain dokumen kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan SEC serta *Bitcoin Law* El Salvador; laporan tahunan serta evaluasi ekonomi dari IMF dan *World Bank*; artikel jurnal ilmiah dan karya akademik seperti tesis yang membahas Ekonomi Politik Internasional, kekuasaan struktural, serta fenomena de-dolarisasi digital; serta laporan riset dari lembaga analisis data *blockchain* dan organisasi ekonomi internasional. Selain itu, data juga diperoleh dari wawancara tidak langsung dan kutipan pernyataan pejabat tinggi Amerika Serikat, otoritas moneter El Salvador, maupun pelaku industri aset digital yang tercantum dalam laporan

media kredibel dan literatur akademik. Seluruh data tersebut digunakan untuk mendukung analisis peran SEC sebagai alat kekuasaan struktural dengan mengacu pada indikator penguasaan struktur keuangan dan pengetahuan sebagaimana dikembangkan dalam teori Structural Power oleh Susan Strange.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui metode telaah pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang beragam, termasuk buku teks dalam bentuk fisik maupun elektronik yang membahas teori Ekonomi Politik Internasional dan kekuasaan struktural, jurnal ilmiah mengenai dinamika aset digital, artikel berita dari media mainstream kredibel yang melaporkan perkembangan kebijakan Bitcoin, serta laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui SEC, Pemerintah El Salvador, serta organisasi internasional seperti IMF yang terkait dengan topik yang diangkat.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Alasannya adalah jenis data yang dipakai untuk menilai peran regulasi sebagai instrumen kekuasaan struktural berupa naskah bacaan, bukan angka. Variabel konsep yang digunakan untuk mengukur dampak kebijakan juga sifatnya kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti penulis dalam menganalisis data:

1. Penulis mengumpulkan data yang relevan terkait kebijakan penegakan hukum SEC Amerika Serikat dan adopsi Bitcoin sebagai *legal tender* di El Salvador.

2. Penulis menggunakan konsep Kekuasaan Struktural yang dikemukakan oleh Susan Strange untuk menganalisis data. Konsep Kekuasaan Struktural ini meliputi dua dimensi utama, yaitu struktur keuangan dan struktur pengetahuan. Dalam menganalisis data, penulis membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mengontrol akses likuiditas yang terkait dengan struktur keuangan, dan otoritas dalam menentukan standar risiko serta legalitas aset digital yang terkait dengan struktur pengetahuan. Dengan menggunakan konsep Kekuasaan Struktural ini, penulis dapat memahami bagaimana struktur keuangan dan struktur pengetahuan mempengaruhi akses likuiditas dan otoritas dalam menentukan standar risiko serta legalitas aset digital.
3. Setelah proses kategorisasi selesai, penulis melakukan tinjauan ulang terhadap data-data tersebut sesuai dengan konsep Sekuritisasi dan *Weaponized Interdependence*, untuk menentukan bagaimana kebijakan SEC tersebut secara efektif membatasi kedaulatan moneter El Salvador dalam sistem ekonomi politik internasional.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang secara konsisten berpijak pada kerangka Kekuasaan Struktural (*Structural Power*) dari Susan Strange (1988). Proses analisis dioperasionalkan dengan menelusuri hubungan sistematis antara kebijakan regulasi SEC Amerika Serikat sebagai instrumen kekuasaan, terhadap kedaulatan moneter El Salvador. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu struktur keuangan dan

struktur pengetahuan. Dalam struktur keuangan, kita dapat melihat seberapa besar kontrol yang dimiliki atas likuiditas dan akses pasar modal. Sementara itu, struktur pengetahuan digunakan untuk menilai seberapa besar otoritas SEC dapat mendefinisikan risiko dan legalitas aset digital dengan tepat. Dengan demikian, kita dapat memahami dengan lebih baik tentang bagaimana aset digital dapat dikontrol dan diatur dengan efektif.

Selanjutnya, analisis dilakukan lebih dalam dengan menggabungkan konsep Sekuritisasi dari *Copenhagen School* untuk mengetahui bagaimana cerita tentang ancaman yang dibuat oleh *Securities and Exchange Commission* mempengaruhi tekanan dari lembaga internasional seperti IMF. Data dianalisis secara menyeluruh dengan membandingkan tindakan penegakan hukum SEC dan upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam sistem keuangan tradisional. Para peneliti mempertimbangkan bagaimana kekuatan USD dan peran sentral Amerika Serikat dalam mengendalikan sistem keuangan internasional berpengaruh dalam mengontrol inovasi moneter baru dari negara-negara lain.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif ini, kualitas data ditentukan berdasarkan beberapa prinsip yang penting. Ada dua paradigma utama yang menjadi acuan, yaitu interpretif dan kritis. Paradigma interpretif juga dikenal sebagai konstruktivis. Kedua paradigma ini membantu memastikan bahwa proses penelitian kita tidak hanya benar dari sisi metodologis, tetapi juga memberikan pemahaman yang baik tentang realitas sosial dan politik yang rumit dalam sistem

keuangan global. Dengan menggunakan kedua paradigma ini, penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kualitas data yang dikumpulkan. Kualitas data dalam penelitian kualitatif ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dan kritis untuk memastikan kualitas data yang tinggi dan dapat diandalkan.

Dalam pendekatan interpretif atau konstruktivis, kualitas data sangat bergantung pada seberapa kredibel dan otentik pemahaman kita tentang realitas yang dialami oleh para pelaku ekonomi politik. Kredibilitas ini dapat dicapai dengan menyajikan cerita dan penafsiran yang benar-benar mewakili sudut pandang dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengaturan aset digital. Contohnya, kita bisa melihat peran SEC sebagai regulator yang sangat berpengaruh, Pemerintah El Salvador sebagai negara yang mengadopsi Bitcoin, serta lembaga multilateral seperti *International Monetary Fund*. Sementara itu, otentisitas diperoleh melalui penyajian konteks kebijakan yang kaya dan deskriptif, yang mencerminkan persepsi risiko, klaim kedaulatan, serta konstruksi makna yang dimiliki oleh para aktor terhadap adopsi Bitcoin sebagai tantangan bagi sistem moneter tradisional.

Dalam paradigma kritis, kualitas data diukur dengan menganalisis bagaimana penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial, historis, ekonomi, dan politik yang membentuk struktur kekuasaan Amerika Serikat terhadap sistem keuangan internasional. Penelitian ini tidak hanya membahas tindakan penegakan hukum SEC terkini, tetapi juga mencari tahu akar historis dari hegemoni USD.

Selain itu, penelitian ini juga mempelajari bagaimana institusi keuangan global terlibat dalam mempertahankan status quo. Terakhir, penelitian ini memahami bagaimana relasi kekuasaan struktural membatasi otonomi ekonomi negara-negara periferi melalui mekanisme Weaponized Interdependence. Melalui paradigma ini, kualitas data dipastikan mampu mengungkap bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan ketergantungan jaringan infrastruktur keuangan global sebagai alat politik untuk mendisiplinkan aktor-aktor yang berusaha keluar dari sistem moneter tradisional yang berbasis pada supremasi USD.

Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan reflektif terhadap peran SEC sebagai instrumen kekuasaan struktural, sekaligus mengungkap kondisi sistemik yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan El Salvador dalam mewujudkan kedaulatan moneter digital di tengah tekanan global.